

# Coklit KPU Dipertanyakan

2.023.556 Pemilih Tak Masuk DPT Pilkada 2018

**JAKARTA** - Perhelatan pilkada serentak 2018 menyisakan fakta bahwa masih ada 2.023.556 pemilih yang tidak masuk data pemilih tetap (DPT) dari KPU.

Mereka terpaksa masuk data pemilih tambahan (DPTb) agar bisa menggunakan hak pilih. Fakta ini menunjukkan bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih oleh jajaran KPU tidak berjalan maksimal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun meminta agar jutaan pemilih dalam DPTb Pilkada 2018 masuk DPT Pemilu Serentak 2019. "Kami minta KPU untuk memasukkannya ke DPS pileg dan pilpres sehingga angka DPTb itu tidak hilang," ujar Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin.



Ketua Bawaslu Abhan (kedua dari kanan) bersama anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), Muhammad Afifudin (kedua dari kiri), Ratna Dewi Pettalolo (kanan) berbincang saat akan memberikan keterangan pers mengenai pengawasan Bawaslu pada Pilkada Serentak 2018 di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.

**Pemilih tambahan tersebut adalah masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar oleh KPU.**

MUHAMMAD AFIFUDDIN  
Komisioner Bawaslu

Dia menjelaskan, pemilih yang masuk DPTb artinya tidak masuk dalam DPT sehingga rawan kehilangan hak pilih. Padahal, jumlah tersebut memiliki persentase lebih dari satu persen dari total pemilih dalam Pilkada 2018. Menurutnya, jumlah DPTb tersebut

mencerminkan tahapan coklit daftar pemilih oleh KPU tidak akurat. Atas dasar itu, Bawaslu mendesak KPU untuk memperbaiki data coklit guna keperluan pemilu nasional tahun depan. "Jadi, total pemilih dalam kategori DPTb itu adalah orang-orang yang tidak masuk coklit sehingga menjelang hari H pemungutan suara, mereka mengurus surat-surat supaya dapat memilih pada pilkada kemarin. Jumlah 2.472.684 orang itu artinya angka yang besar, karena itu lebih dari satu persen dari seluruh pemilih," ungkapnya.

Berdasarkan data pengawasan Bawaslu, total jumlah pemilih di pilkada 17 provinsi

pada 27 Juni 2018 lalu sebanyak 143.667.935 orang. Dari jumlah tersebut, 141.470.826 orang masuk dalam DPT dan 173.553 orang masuk daftar pemilih pindah (DPPH). "DPTb menjadi dasar evaluasi Bawaslu terhadap proses pemutakhiran data pemilih, karena pemilih tambahan tersebut adalah masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar oleh KPU," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan KPU telah menetapkan 185 juta daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 mendatang. Jumlah tersebut mengalami perubahan setelah adanya tambahan dari

empat kabupaten/kota di Papua yang sebelumnya belum melakukan penetapan DPS. "Penambahan tersebut berasal dari Kabupaten Intan Jaya 81.415, Kabupaten Mimika 237.179, Mamberamo Tengah 33.265, serta Lanny Jaya 186.534. Dengan demikian, kami menetapkan DPS kita 185.639.674 pemilih serta 801.838 TPS. Setelah DPS ditetapkan kami akan melakukan tahapan perbaikan penyusunan DPS (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) nanti," ucapnya di Gedung KPU kemarin.

Data tersebut, sambungnya, akan berlanjut ke proses penyusunan DPS sebelum

nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) Agustus mendatang. Rekomendasi Bawaslu akan dipertimbangkan dalam proses perbaikan tersebut.

KPU mengantisipasi adanya pemilih ganda dengan melakukan verifikasi melalui program Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), sebab data pemilih luar negeri nantinya akan masuk lebih dulu ke data KPU karena menggunakan sistem *early vote*. "Jadi setelah melakukan tahapan perbaikan penyusunan DPS, baru akan kita tetapkan DPT pada Agustus," tegasnya.

● mula akmal

## PELAYANAN IBADAH HAJI

# Kloter Calhaj Pertama Terbang 17 Juli

**JAKARTA** - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Agama (Kemenag) bakal memberangkatkan 11 kloter calon jamaah haji (calhaj) ke Tanah Suci pada gelombang pertama yang dimulai 17 Juli mendatang.

"Untuk pemberangkatan per-tamat tersebut akan diterbangkan melalui lima embarkasi," sebut Kasi Pelayanan Transportasi Udara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Edayanti Dsril di Jakarta kemarin.

Mereka akan diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya (3 kloter), Padang (1 kloter), Lombok (1 kloter), Solo (4 kloter), Jakarta-Pondok Gede (1 kloter), dan Makassar (1 kloter). "Total ada 4.486 jamaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Juli," ujarnya.

Edayanti menambahkan, pemberangkatan jamaah haji Indonesia akan dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama, jamaah diterbangkan menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Pemberangkatan gelombang pertama berlangsung selama 13 hari, yakni 17-29 Juli.

Adapun jamaah haji gelombang kedua diberangkatkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Proses pemberangkatan berlangsung selama 17 hari, yakni 30 Juli hingga 15 Agustus.

Total ada 13 embarkasi pemberangkatan jamaah haji di Indonesia, yaitu Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Palembang (PLM), Padang (PDG), Jakarta-Pondok Gede (JPG), Jakarta-Bekasi (JKS), Solo (SOC), Surabaya (SUB), Banjarmasin (BDJ), Balikpapan (BPN), Makassar (UPG), dan Lombok (LOP).

Sementara itu Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag Aha Barori menjelaskan bahwa pada tahun ini khusus untuk jamaah embarkasi Jakarta Pondok Ge-

de-Bekasi dan Surabaya, pelaksanaan sidik jari dan foto *biometrik* untuk paspor dilakukan di asrama haji. Jamaah cukup melakukan sidik jari dengan telunjuk tangan kanan.

"Sedangkan stempelnya dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda, jika ujanjarnya. Stempel paspor jamaah haji dilakukan di 13 loket gerai yang disediakan di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda.

Dengan demikian, setelah jamaah haji tiba di bandara Madinah maupun Jeddah, Arab Saudi, sudah tidak lagi antre untuk mendapatkan stempel paspor. "Jadi jamaah turun dari pesawat bisa langsung keluar bandara, itu menghemat banyak waktu. Biasanya perlu waktu 4-5 jam, sekarang paling hanya sekitar 30-60 menit," urainya.

Diharapkan sistem baru ini bisa diberlakukan di semua embarkasi. "Mudah-mudahan kalau tenaganya cukup. Ini kan dari Pemerintah Arab Saudi," imbuhnya.

## Kategori Risti

Sebanyak 34.112 calhaj asal Jateng dan DIY serta petugas pendamping siap diberangkatkan melalui Embarkasi Solo. Kesehatan menjadi salah satu fokus perhatian karena 80% diantaranya masuk kategori risiko tinggi (risti).

Kepala Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo Afief Mundzir mengatakan, persiapan pemberangkatan calhaj saat ini sudah 100%, mulai dari asrama haji, pelayanan akomodasi, kesehatan hingga lainnya. "Kondisi kesehatan calon jamaah perlu mendapatkan perhatian ekstra karena 80% masuk kategori risti," katanya tadi malam. Data itu dihipung melalui pemeriksaan berjenjang di kabupaten/kota.

● sunu hastoro/  
ary wahyu wibowo

## PERDAMAIAN DUNIA

# Lebanon Apresiasi TNI dalam Misi PBB

**JAKARTA** - Indonesia memiliki sejarah panjang berperan dalam perdamaian dunia di berbagai negara sejak 1957 atau hanya satu dekade setelah kemerdekaan melalui Kontingen Garuda.

Demikian pula di Lebanon, Indonesia sejak 2006 menjadi penjaga perdamaian di negara yang berbatasan langsung dengan Israel itu. Peran Indonesia ini diapresiasi para pejabat Lebanon. Bahkan pasukan Indonesia dianggap sebagai garda depan dalam menjaga perdamaian di kawan tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Lebanon YM Yaacoub Saaraf kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kantor Kementerian Pertahanan Lebanon, Selasa (10/7). Fadli Zon memimpin delegasi anggota DPR di antaranya Elnino M Husein Mohi (Komisi I), Ratih Sanggarwati (Komisi X), Tubagus Soemandjaja Roekmandis (Komisi III), Andika Pandu Puragabaya (Komisi I), Deding Ishak (Komisi VIII), dan didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon HE Achmad Chozin Chumaidy.

Menhan Yaacoub Saaraf menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pasukan TNI sebagai komponen pasukan terbesar di UNIFIL dalam menjaga keamanan dan perdamaian di Lebanon. Saaraf juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah partner terbaik bagi Lebanon.

Indonesiadan Lebanon memiliki kesamaan latar belakang sejarah dan budaya. Keduanya juga memiliki kesamaan sikap menentang agresi dan penjajahan Israel. "Indonesia bisa berperan lebih besar menengahi konflik di Timur Tengah," kata Saaraf.

Saraf juga menyampaikan bahwa ada dua masalah utama keamanan Lebanon saat ini, yaitu ancaman terorisme di



Menteri Pertahanan Lebanon YM Yaacoub Saaraf (kedua dari kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua dari kanan) dan jajaran anggota DPR RI di Kantor Kementerian Pertahanan Lebanon, Selasa (10/7).

perbatasan dan masalah pengungsi Suriah dan Palestina yang telah mencapai lebih dari 2 juta jiwa atau lebih dari 1/3 penduduk Lebanon yang cuma berjumlah 4,5 juta jiwa. Ini menggerus sumber daya di Lebanon. Meskipun badan urusan pengungsi PBB UNHCR telah banyak membantu, hal itu belum cukup.

Karena itu Yaacoub Saaraf sangat mengharapkan dunia internasional dapat membantu Lebanon mengatasi masalah yang cukup pelik tersebut.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon menyatakan bahwa ikut serta menjaga perdamaian dunia telah menjadi amanat konstitusi UUD 1945. Karena itu Indonesia menyatakan siap dan tetap berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan PBB di bawah bendera UNIFIL untuk terus menjaga perdamaian di Lebanon, khususnya di wila-

ayah selatan. Hingga kini Indonesia berkontribusi mendukung Lebanon melalui penempatan 1297 personel TNI dalam misi United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL). Selain itu DPR turut aktif mengampangkan perdamaian pada forum-forum internasional. Secara khusus DPR selalu menentang kekejaman Israel kepada penduduk Palestina, termasuk mengancam pemindahan Kedutaan Amerika di Yerusalem yang menimbulkan gelombang baru.

Yaacoub Saaraf sangat mengharapkan agar kerja sama Indonesia dan Lebanon lebih diperluas tidak saja di bawah bendera UNIFIL, tetapi juga mencakup kerja sama bilateral bidang hankam. Misalnya kerja sama dalam rangka penanganan terorisme yang telah mengancam ba-

nyak negara, khususnya di Indonesia maupun di Lebanon. Selain kerja sama hankam, Menhan Lebanon juga berharap kedua negara dapat meningkatkan hubungan kerja samabilateral dibidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur.

Fadli Zon menyambut baik upaya memperluas kerja sama RI dan Lebanon untuk menanggulangi terorisme. "Indonesia perlu meningkatkan hubungan dengan Lebanon khususnya melalui Kementerian Pertahanan untuk mengongkrekkan beberapa bidang pertahanan antarkedua negara. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, punya beragam etnis dan agama, Indonesia cukup berhasil mengelola perbedaan melalui jalan demokrasi," ungkap Fadli Zon.

● nugroho



**PT MNC Land Tbk.**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 6 Agustus 2018  
Pukul : 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : iNews Tower Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSBL"):

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan Mengubah Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.  
Penjelasan:  
Agenda Peningkatan Modal Dasar Perseroan dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan.  
Penjelasan:  
Agenda Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapeppam IX.D.5 Pasal 14 dan 15.
3. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan Mengubah Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.  
Penjelasan:  
Agenda Pelaksanaan Stock Split dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek I.A., Pasal VI.3.1 dan Pasal VI.4.1.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
Penjelasan:  
Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT BSR Indonesia, Gedung High End Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, Telp: (021) 80864722
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap, serta akta pengangkatan susunan pengurus terakhir;
6. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Juli 2018  
PT MNC Land Tbk  
Direksi Perseroan